

ABSTRAK

Analisis Tata Kelola Program makanan Bergizi Gratis(MBG) di SPPG Lebong Sakti

Oleh:

Riki Musben

2263201004

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebong berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, efektivitas, supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, dan daya tanggap dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Lebong secara umum telah berjalan dengan cukup baik sesuai prinsip *good governance*, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek pengawasan keamanan pangan dan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan program lebih optimal.

Kata Kunci: Tata Kelola, *Good Governance*, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sppg lebong Sakti

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE GOVERNANCE OF THE FREE NUTRITIOUS MEALS (MBG) PROGRAM AT SPPG LEBONG SAKTI

By:
Riki Musben
2263201004

This study aims to analyze the governance of the Free Nutritious Meals (MBG) Program in Lebong Regency based on the principles of good governance, including accountability, transparency, effectiveness, the rule of law, consensus orientation, and responsiveness.

This study employed a qualitative research method using interviews, observations, and documentation as data collection techniques.

The results indicate that the governance of the Free Nutritious Meals Program in Lebong Regency has generally been implemented fairly well in accordance with the principles of good governance. However, improvements are still needed, particularly in food safety supervision and interagency coordination, to ensure that the program is implemented more effectively and optimally.

Keywords: Governance, Good Governance, Free Nutritious Meals Program (MBG), SPPG Lebong Sakti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini pada tahun 2025 mencapai Rp71 triliun (Waluyo, 2025).

Program ini bertujuan memastikan bahwa setiap warga negara, terutama anak-anak sekolah dan kelompok rentan, memperoleh akses terhadap makanan bergizi gratis, aman dan terjangkau. Di tengah peningkatan ancaman ketahanan pangan akibat perubahan iklim, inflasi pangan serta ketimpangan distribusi sumber daya, program ini memiliki strategis tidak hanya dari aspek sosial ekonomi tetapi juga sebagai bentuk strategi bela negara (Frangky jon fitter, 2025)

Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang Beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal menjadi penting. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) (Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, 2023). Secara keseluruhan, memastikan ketersediaan dan akses terhadap makanan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, merupakan langkah krusial dalam meningkatkan kesejahteraan. (Waluyo et al., 2025)

Ketahanan gizi merupakan faktor yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional, hal ini berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu negara. Berdasarkan SSGI (2023) terdapat 21,6% balita stunting dan 10,8% wasting di Indonesia, hal tersebut merupakan indikator kritis gagalnya akses gizi kelompok rentan. Indonesia masih

menghadapi tantangan besar dalam hal kekurangan gizi, stunting, dan ketahanan pangan, terutama di kalangan masyarakat miskin dan rentan (Global Nutrition Report, 2021).

Kondisi ini menghambat perkembangan kognitif, menurunkan produktivitas masa depan, dan berkontribusi pada rendahnya nilai Human Capital Index (HCI) di Indonesia. Berdasarkan Word Bank 2020,(Santoso, 2025)

HCI di Indonesia hanya mencapai 0,54 pada 2020. Hal tersebut mengindikasikan seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimal ketika dewasa. Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN. Program MBG bertujuan memberikan akses makanan bergizi kepada anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan status gizi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas (Kemenkes RI, 2022dalam (Santoso, 2025)).

Program MBG merupakan intervensi strategis pemerintah dalam mengatasi tiga masalah dalam kekurangan gizi(stunting, wasting, dan obesitas) di Indonesia. MBG memiliki potensi besar dalam memperbaiki status gizi nasional, meningkatkan konsentrasi belajar, dan menurunkan angka putus sekolah. MBG mencerminkan paradigma baru dalam kebijakan sosial, menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.(Santoso, 2025)

Implementasi program MBG tidak terlepas dari berbagai tantangan tata kelola, seperti koordinasi antar lembaga, transparansi anggaran, akuntabilitas distribusi, serta pemantauan dan evaluasi yang efektif Pratiwi (2025). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program bantuan pangan sering kali tidak mencapai sasaran optimal karena lemahnya mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat (World Bank, 2019).

Agustina et al. (2021) mengemukakan bahwa intervensi gizi berbasis sekolah memiliki dampak signifikan terhadap penurunan stunting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk perencanaan berbasis data dan kolaborasi multistakeholder. (Santoso, 2025)

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, maka didapatkan pertanyaan yang mendasari penelitian ini yaitu “Apa faktor penting dalam tata kelola BGN agar pelaksanaan program MBG menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang optimal?”. Oleh karena itu diperlukan analisis awal dalam menentukan faktor- faktor kunci dalam tata kelola BGN yang menentukan keberhasilan program MBG, sehingga tercipta dampak sosial (perbaikan gizi) dan ekonomi (pengurangan kemiskinan), serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola BGN sehingga implementasi program MBG menjadi efektif dan berkelanjutan. (Santoso, 2025)

Kabupaten Lebong sebagai bagian dari Provinsi Bengkulu juga menghadapi persoalan gizi anak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong, beberapa kecamatan masih mencatatkan angka stunting, anemia, serta rendahnya tingkat pengetahuan gizi di kalangan siswa sekolah dasar dan menengah. Permasalahan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga pengetahuan gizi, akses terhadap makanan sehat, serta kualitas makanan yang disediakan di sekolah. Oleh sebab itu, program MBG menjadi salah satu instrumen kunci pemerintah daerah dalam memastikan bahwa seluruh siswa memperoleh makanan aman, sehat, dan bergizi.

Implementasi program Makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Lebong tidak terlepas dari berbagai tantangan tata kelola (*governance*). Tata kelola mencakup aspek perencanaan, implementasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi program. Menurut UNDP (1997), tata kelola yang baik (*good governance*) harus mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Ketika prinsip-prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan program dapat

menimbulkan risiko penyimpangan, inefisiensi, hingga masalah kesehatan yang dapat membahayakan peserta didik.

Implementasi program Makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Lebong, terdapat sejumlah permasalahan yang mulai mencuat di masyarakat maupun sekolah. Beberapa laporan menunjukkan adanya makanan yang tidak memenuhi standar higienitas, kurang variatif, tidak sesuai standar gizi, bahkan pernah terjadi kasus keracunan makanan pada peserta didik. Kasus keracunan ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang serius, mengingat anak sekolah merupakan kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan ekstra. Makanan yang tidak aman dapat berdampak pada kesehatan jangka pendek seperti mual, muntah, diare, maupun jangka panjang seperti gangguan gizi dan infeksi berulang.



Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program Makanan bergizi gratis (MBG) menunjukkan adanya potensi celah dalam tata kelola. Celah tersebut dapat terjadi pada proses perencanaan, seperti ketidaktepatan pendataan siswa penerima, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan sekolah, maupun minimnya pelatihan bagi penyedia makanan. Dalam tahap pelaksanaan, kendala sering terjadi pada proses pengadaan bahan makanan, pemilihan pemasok, proses memasak yang tidak memenuhi standar *food safety*, hingga distribusi makanan ke sekolah. Pada tahap

pengawasan, lemahnya koordinasi antara dinas terkait dapat menyebabkan kurang optimalnya pemantauan kualitas makanan.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika berkaitan dengan faktor sosial budaya masyarakat. Kebiasaan makan siswa, preferensi makanan, serta tingkat literasi gizi juga berpengaruh terhadap penerimaan program MBG. Sebagian siswa kurang memahami pentingnya makanan bergizi, sehingga kurang antusias terhadap menu yang disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan gizi perlu berjalan beriringan dengan penyediaan makanan bergizi di sekolah.

Selain tantangan internal, program Makanan bergizi gratis (MBG) juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keterbatasan anggaran daerah, kondisi geografis Kabupaten Lebong, akses transportasi, serta kemampuan penyedia lokal dalam memenuhi standar gizi dan sanitasi. Kabupaten Lebong memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari area perbukitan, sehingga moda transportasi dan distribusi bahan makanan memerlukan perhatian khusus. Jika proses distribusi tidak terpantau dengan baik, dapat terjadi penurunan kualitas bahan makanan.

Berdasarkan konteks permasalahan pada Kabupaten Lebong, keberhasilan tata kelola program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, sekolah, penyedia jasa makanan, serta masyarakat. Peran kepala sekolah, guru, komite sekolah, bahkan orang tua menjadi bagian integral dalam mendukung kelancaran program. Namun, sinergi ini tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat sekolah yang belum memahami standar operasional prosedur (SOP) penyimpanan makanan, pengawasan sanitasi dapur, maupun prosedur pelaporan ketika terjadi insiden kontaminasi.

Penelitian mengenai tata kelola program Makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Lebong menjadi sangat relevan, mengingat belum banyak penelitian akademik yang secara spesifik mengkaji implementasi program makanan bergizi gratis di daerah tersebut. Sebagian besar penelitian terkait makanan bergizi berfokus pada gizi anak, stunting, atau program

makanan tambahan (PMT), sementara kajian mengenai tata kelola Makanan bergizi gratis MBG masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi pemerintah daerah, sekolah, dan peneliti selanjutnya.

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih dalam studi ini karena mampu menggali data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami konteks sosial, interpretasi pelaksana program, serta pengalaman langsung para penerima manfaat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana tata kelola program Makanan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan di Kabupaten Lebong, apa saja kendala yang muncul, serta bagaimana strategi perbaikan yang perlu dilakukan.

Bukan hanya menjadi kebutuhan akademik, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi program. Sekolah dapat memperoleh wawasan mengenai penguatan SOP penyimpanan dan pengolahan makanan. Penyedia makanan dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan. Sementara itu, masyarakat dapat memahami pentingnya pengawasan bersama terhadap makanan anak sekolah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tata kelola Program Makanan Bergizi Gratis di kabupaten lebong ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tata kelola program makanan bergizi gratis di kabupaten lebong.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam kajian tata kelola (governance) program sosial dan kesehatan.
- b. Menambah referensi ilmiah terkait implementasi kebijakan

penyediaan makanan bergizi di sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong:

Menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG dan memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan.

b. Bagi Sekolah:

Menjadi bahan evaluasi tata kelola penyediaan makanan di sekolah, termasuk aspek higienitas dan kualitas gizi.

c. Bagi Pelaksana Program (penyedia makanan, dinas pendidikan, dinas kesehatan):

Memberikan gambaran terkait praktik pelaksanaan program serta area yang perlu ditingkatkan agar layanan makanan bergizi menjadi lebih optimal.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan makanan sekolah atau program gizi masyarakat.

